



Wajah Baru Trotoar Malioboro Sebentar Lagi

MALIOBORO tanpa pedagang kaki lima. Kondisi itulah yang menjadi obsesi Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Saya sudah menunggu 18 tahun. Trotoar Malioboro bukan milik mereka, para PKL, melainkan milik toko dan pemerintah, bukan fasilitas kaki lima," ujar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu, kemarin.

Mulai hari ini, para PKL di jalan Malioboro mulai direlokasi secara bertahap. Mereka tidak diusir, tapi ditempatkan di lahan baru, yakni eks Bioskop Indra dan bekas lahan Dinas Pariwisata DIY.

Sempat ada upaya perlawanan dari para PKL. Mereka berunjuk rasa di Kantor DPRD dan Balai Kota Yogyakarta. Namun, program relokasi jalan terus.

Beberapa pedagang pun pasrah. "Yang punya lahan sudah tidak mengizinkan kita berada di sana. Ya, sudah, kami pindah," ujar seorang pedagang makanan.

Namun, ada juga pedagang yang belum mau menerima keputusan pemerintah itu. Mereka tetap melawan dengan memercayakan perjuangan nasib para PKL kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Setidaknya, sampai akhir pekan lalu, ada 159 PKL yang tanda tangan untuk didampingi LBH Yogyakarta.

Era Harivah, pengurus LBH Yogyakarta, menyatakan pihaknya mempersoalkan nasib pedagang di Malioboro. "Di sana, yang mencari nafkah tidak hanya PKL, tapi juga pedagang asongan. Kami akan terus mengawal relokasi ini."

Sementara itu, Sri Sultan sudah berketetapan hati, relokasi harus segera dilakukan. "Tidak ditunda-tunda lagi."

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DIY Kadarmanta Baskara Aji memastikan PKL mendapat banyak keuntungan dengan mengikuti program relokasi itu. Mereka akan berjualan di tempat yang baru.

"Di tempat baru, mereka tidak perlu memindah-mindahkan gerobak dagangan. Pedagang juga tidak perlu membongkar pasang tenda setiap kali memulai atau mengakhiri dagang," jelasnya.

Yang tidak kalah penting, di tempat yang baru itu, status para PKL berdagang di tempat yang legal. "Karena itu, kenyamanan tempat berjualan di lokasi ini akan lebih baik," tegasnya. (AT/N-2)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005